



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 180 / 230 / 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI BLORA TAHUN 2023
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun rencana penyusunan produk hukum daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Blora, maka Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/075/2023 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 perlu disesuaikan dan diganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Blora 45 Tahun 2019 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 45);

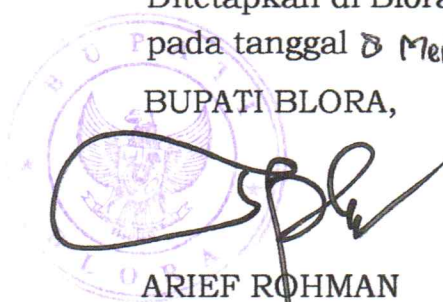
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 180.18/075/2023 tentang Penetapan Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Blora Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 180 / 230 / 2023
 TANGGAL : 8 Mei 2023

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BLORA
 TAHUN 2023

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
1.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
2.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Gas Hulu	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
3.	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora	RSUD dr. R. Soetijono Blora	
4.	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu	
5.	Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Blora Tahun 2023-2027	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA	
6.	Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Blora	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA SETDA KAB. BLORA	
7.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
8.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BLORA	
9.	Rencana Detail Tata Ruang Kec. Blora dan Kab. Blora Tahun 2023-2043	DPUPR KAB. BLORA	
10.	Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cepu dan Kab. Blora Tahun 2023-2043	DPUPR KAB. BLORA	
11.	Layanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLORA	
12.	Manajemen Talenta	BKD KAB. BLORA	
13.	Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama	BKD KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
14.	Tugas Belajar, Penerbitan Keterangan Belajar Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
15.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPPKAD KAB. BLORA	
16.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BPPKAD KAB. BLORA	
17.	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan APBD Kab. Blora	BPPKAD KAB. BLORA	
18.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPPKAD KAB. BLORA	
19.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
20.	Standar Harga Satuan	BPPKAD KAB. BLORA	
21.	Analisis Standar Belanja	BPPKAD KAB. BLORA	
22.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
23.	Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
24.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	BPPKAD KAB. BLORA	
25.	Penetapan Nilai Sewa Reklame	BPPKAD KAB. BLORA	
26.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora pada Badan Usaha Milik Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	
27.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023	BPPKAD KAB. BLORA	
28.	Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP KAB. BLORA	
29.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
30.	Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Aparatura Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
31.	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	
32.	Pedoman Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
33.	Pemberdayaan Usaha Mikro	DINDAGKOP UKM KAB. BLORA	
34.	Penyelenggaraan Koperasi	DINDAGKOP UKM KAB. BLORA	
35.	Pengelolaan Pasar Daerah	DINDAGKOP UKM KAB. BLORA	
36.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah	BAPPEDA KAB. BLORA	
37.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	BAPPEDA KAB. BLORA/BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
38.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data	BAPPEDA KAB. BLORA	
39.	Komisi Disabilitas	DINSOS P3A KAB. BLORA	
40.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Anak	DINSOS P3A KAB. BLORA	
41.	Perlindungan Anak	DINSOS P3A KAB. BLORA	
42.	Kabupaten Layak Anak	DINSOS P3A KAB. BLORA	
43.	Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau	DINSOS P3A KAB. BLORA	
44.	Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting	DINKES KAB. BLORA	
45.	Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA	
46.	Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA	
47.	Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA	



NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
48.	Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kabupaten Blora	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA	
49.	Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
50.	Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
51.	Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok Di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
52.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
53.	Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	DINAS PMD KAB. BLORA	
54.	Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024	DINAS PMD KAB. BLORA	
55.	Pedoman Pengelolaan Aset Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
56.	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
57.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DINAS PMD KAB. BLORA	
58.	Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora	DINAS PMD KAB. BLORA	
59.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
60.	Perubahan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
61.	Pedoman Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
62.	Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
63.	Pengaturan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
64.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026	BAPPEDA KAB. BLORA	
65.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2022-2046	DINDALDUK KB KAB. BLORA	
66.	Peraturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	BKD KAB. BLORA	
67.	Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	BKD KAB. BLORA	
68.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
69.	Cagar Budaya	DINPORABUDPAR KAB. BLORA	
70.	Penyelenggaraan Perpustakaan	DPK KAB. BLORA	
71.	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	DPK KAB. BLORA	
72.	Perpustakaan Desa	DPK KAB. BLORA	
73.	Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan	DINDALDUK KB	
74.	Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
75.	Pembinaan dan Pengawasan BLUD	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
76.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Blora	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
77.	Rencana Strategis	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
78.	Standar Pelayanan Minimal	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
79.	Penyusunan, Pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
80.	Pelaksanaan Anggaran	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
81.	Pengadaan Barang dan Jasa	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
82.	Tata Cara Penghapusan Piutang	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
83.	Tata Cara Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
84.	Tata Cara Kerja Sama	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
85.	Pengelolaan Investasi	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
86.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
87.	Kebijakan Akuntansi	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
88.	Penilaian Kinerja BLUD dan Laporan Dewan Pengawas	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
89.	Laporan Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan kepegawaian	RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
90.	Pejabat Pengelola dan Pegawai Profesional lainnya	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
91.	Pembinaan dan Pengawasan BLUD	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
92.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
93.	Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD di Kab Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
94.	Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD di Kab Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
95.	Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dr R Soetijono Blora	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
96.	Tarif Layanan pada RSUD Kab Blora yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
97.	Pengadaan Barang dan Jasa	RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA/DINAS KESEHATAN KAB. BLORA	
98.	Ketentuan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA	
99.	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kawasan Wonorejo Kecamatan Cepu	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BLORA	
100.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 38 Th 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Blora	BAGIAN KESRA SETDA KAB. BLORA	
101.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KAB. BLORA	
102.	Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	DPK KAB. BLORA	
103.	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora	BPPKAD KAB. BLORA	
104.	Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Program 1 (satu) Desa 2 (dua) Sarjana	DINSOS P3A KAB. BLORA	
105.	Program Blora Pintar	DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA	
106.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPPKAD KAB. BLORA	
107.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora	DINAS PENDIDIKAN KAB BLORA	
108.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 tahun 2022 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 - 2026	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BLORA	
109.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA	
110.	Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPPKAD KAB. BLORA	

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PEMRAKARSA	KET.
111.	Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora	DINKES KAB. BLORA	

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN